

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bram Deni, 2014, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publishing, Bekasi.
- Hadjon M. Philipus, 1992, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Joni H, 2015, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Moleong Lexy, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ridwan, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Pradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok.
- Ridwan, 2014, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Rahmadi Takdir, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Edisi Kedua, Rajawali Pers, Depok.
- Soeroso R, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke 8, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, Mamuji Sri, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumardjono SW. Maria, 2014, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, UGM Yogyakarta.
- Tumpa A. Harifin, 2010, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undang:

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3344).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059).

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3853).

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5285).

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5617).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 314).

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Karya Ilmiah:

Santosa Achmad Mas, 2014, "Efektivitas Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Disertasi*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

<http://law.wphost2.ui.ac.id/2014/06/21/promosi-doktor-mas-achmad-santosa-dan-binoto-nadapdap/>, diakses pada tanggal 2 Juli 2018.

Dewi Kusuma Dahlia, 2013, "Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009)". *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Dalam Program Magister Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2008, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta.

Artikel Jurnal:

Ariefianto Agung Harry, “Penerapan Sanksi Administrasi Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Industri (Studi Kasus di CV. Slamet Widodo di Semarang)”, *Unnes Law Journal, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang*, Vol. 4, No.1, Juni 2015.

Handayani Rachmi Ketut Ayu Gusti I, “Peran Sanksi Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia”, *Pranata Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta*, Vol. 5, No. 1, Januari 2010.

Ngala Korompis Andrew, “Sanksi Administratif Dalam Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Lex Crimen, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado*, Vol. 7, No.1, Januari-Maret 2018.

Makalah:

Sitorus Henry, 2004, “Kerusakan Lingkungan Oleh Limbah Industri Adalah Masalah Itikad”, *Makalah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Sosiologi, Universitas Sumatera Utara*.

Yusuf Warlan Asep, 2012, sebagaimana mengutip pendapat Paulus Effendi Lotulung, 1995, Praktek Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Kaidah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, *Makalah, dalam Kursus Penegakan Hukum Lingkungan, Kerjasama antara Fakultas Hukum UI dengan Bapedal*.

Yusuf Warlan Asep, 2012, Memahami Ketentuan Sanksi Administrasi Dalam UU No. 32 Tahun 2009, *Makalah, dalam Rapat Penegakan Hukum Lingkungan*.